

Lampiran : KEPUTUSAN SEKERTARIS DAERAH PROVINSI SELAWESI SELATAN  
 Nomor : 1854/ X /TAHUN-2019  
 Tanggal : 10 - 10 - 2019  
 TENTANG : Klasifikasi Informasi yang dikecualikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN BERDASARKAN HASIL PENGUJIAN KONSEKUENSI  
 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2019**

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU PENGEKUALIAN
			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	
1	Bio Data Elektronik	UUD 1945 Pasal 28A s.d 28H - UU No 14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 h	- Mengungkapkan data pribadi seseorang ASN - Kemungkinan besar melanggar HAM - Kemungkin bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan atau mengajukan gugatan di pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
2	Identitas ASN yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H - UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h	- Mengungkap data pribadi ASN - melanggar HAM - bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu - Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan	- Melindungi data pribadi ASN - Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu - Menghindari keberatan atau gugatan hukum	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

3	Identitas ASN yang mengajukan izin perceraian/perwakinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 27 huruf h</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
4	Daftar Nilai SKP ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP No. 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
5	Data Rekam Medis ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- Permenkes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medik, Pasal 1c</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengungkap data pribadi ASN</li> <li>- Melanggar HAM</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu sehingga merugikan yang bersangkutan</li> <li>- Yang bersangkutan bisa mengajukan keberatan atau gugatan ke pengadilan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi data pribadi ASN</li> <li>- Menghindari penyalahgunaan data pribadi oleh pihak tertentu</li> <li>- Menghindari keberatan atau gugatan hukum</li> <li>- Keamanan dan kenyamanan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.

6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28A s.d. 28H</li> <li>- UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- PP No.10 tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural jo. PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 100 Tahun 2000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengganggu dan menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</li> <li>- Dapat merugikan pemerintah daerah dan ASN yang bersangkutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kondusivitas proses penyusunan atau pengambilan keputusan</li> <li>- Menjaga keamanan pengambilan kebijakan</li> <li>- Menjaga kerahasiaan data pribadi ASN</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
7	Arsip dinamis yang menurut sifatnya rahasia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i</li> <li>- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara pribadi</li> <li>- Bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjaga kerahasiaan dokumen</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan dokumen oleh pihak tertentu</li> </ul>	Setelah mendapat izin tertulis dari yang bersangkutan.
8	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j</li> <li>- Kepres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan atau program karena adanya pengungkapan secara prematur</li> <li>- Dapat menimbulkan penilaian tidak obyektif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar</li> <li>- Mencegah terjadinya penilaian yang tidak obyektif</li> </ul>	Selama Proses penawaran berjalan
9	10. Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i dan huruf j.</li> <li>- Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</li> </ul>	Menghindari persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga obyektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa selesai
10	Lokasi server	UU No. 11 Tahun 2008, Pasal 30-37 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30-37	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencegah tindakan pencurian</li> <li>- Mencegah tindakan pengrusakan dan kriminil lainnya</li> <li>- Mencegah adanya penyalahgunaan oleh pihak tertentu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengamankan perangkat</li> <li>- Mengamankan data elektronik</li> </ul>	Selama masih aktif

11	Internet Protokol/IP Address Privat	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 3	Seangan Hacker	Mencegah serangan hacker dan perlindungan hak privatisasi	Selama masih aktif
12	Bandwitch management	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30	Penyalahgunaan kapasitas bandwitch diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwitch	Selama masih aktif
13	Kode Akses Elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 10	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
14	Sistem keamanan elektronik	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif
15	Sistem Management Database	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf J - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	- Penyalahgunaan oleh pihak lain	- Mencegah penyalahgunaan oleh pihak lain. - Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih aktif digunakan
16	Hasill Pemeriksaan reguler, Pemeriksaan Kasus, Pemeriksaan Khusus, Review Laporan Keuangan, Evaluasi/Pemantauan	- UU No.1 tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 huruf c dan Pasal 17 huruf i. - Peraturan MENPAN No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan dan No. PER/05/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Internal Pemerintah. - Peraturan Mendagri No. 28 tahun 2007, norma pengawasan pemerintah lampiran I bab Norma Pelaporan huruf a	Menghambat kesuksesan pelaksanaan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai ada keputusan hukum

17	Naskah Soal UN/UNBK/UASBN	Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan/ sesuai tahun Pelajaran
18	19. Proses Scanning/ Scoring UN/UNBK/UASBN	Pasal 362 KUHP, Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,	Membocorkan rahasia negara	Melindungi rahasia negara	Sampai digunakan/ sesuai tahun Pelajaran
19	Data KAK/OE/HPS/RAB	Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Bisa menyebabkan proses lelang pekerjaan yang tidak sesuai dengan mekanisme atau tata cara pelelangan	Untuk menjaga kerahasiaan dalam proses pelelangan sehingga proses berjalan dengan lancar karena sesuai dengan mekanisme dan tata cara pelelangan	Selama Proses Lelang hingga selesai
20	Source Code (basic Desain) Website dan aplikasi	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Serangan hacker	- Menghindari serangan hacker - Perlindungan Hak privat - Mencegah penyalahgunaan	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
21	Data Center Room	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan informasi	Pengamanan data	Sampai mendapat izin tertulis dari yang berwenang
22	Surat/Dokumen/Infomasi Persandian	Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 76/K/KEP.4.003/2000 Tahun 2000 tentang Sistem Persandian Negara	Tersebarnya isi surat rahasia Negara	Pengamanan informasi	Selama belum tiba ke tujuan surat
23	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum

24	Bahan/data Pemeriksaan	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap	- Membahayakan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan - Memungkinkan penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
25	Identitas Pelapor/Pengadu	- UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP - PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	- Mengancam keamanan pelapor - Memungkinkan adanya gugatan hukum dari yang bersangkutan	- Melindungi pelapor - Mencegah adanya gugatan hukum - Mencegah penyalahgunaan informasi	Sampai ada keputusan hukum yang tetap
26	Proses Penjatuhan Hukum Disiplin	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP	- Dapat mengungkap rahasia pribadi - Penyalahgunaan Data pribadi - Mendapat gugatan dari yang bersangkutan	Melindungi data pribadi seseorang	Sampai ada keputusan hukum yang tetap

**Sekretaris Daerah,  
Selaku Atasan PPID Provinsi Sulawesi Selatan**



**Dr. ABDUL HAYAT, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama  
NIP. : 19650405 199010 1 002